

Lampiran 2

PRIORITAS NASIONAL 2010-2014 (RPJM BUKU I)

Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Prioritas 5 : Ketahanan Pangan
Prioritas 6 : Infrastruktur
Peioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Kementerian Kehutanan

MATRIKS RPJM BUKU I KEMENTERIAN KEHUTANAN

Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Milyar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
A	SUMBERDAYA MANUSIA												
1	Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi secara terpusat selambat-lambatnya 2011												
1.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenhut												
1.1.1	Penyelenggaraan administrasi dan penataan kepegawaian Kemenhut	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan administrasi kepegawaian secara akurat dan tepat waktu sebanyak 50.000 dokumen Pengembangan kapasitas SDM/pegawai sebanyak 17.697 orang Pengembangan instrumen pengelolaan kepegawaian sebanyak 10 jenis Penguatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis internet, 1 paket per tahun 	10.000 dok	20.000 dok	30.000 dok	40.000 dok	50.000 dok	16,15	18,90	19,09	19,66	19,69	93,49
			17.697 peg	17.697 peg	17.697 peg	17.697 peg	17.697 peg						
			2 jenis	4 jenis	6 jenis	8 jenis	10 jenis						
			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket						
1.1.2	Penyelenggaraan Diklat aparatur dan SDM kehutanan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan SMK Kehutanan 1.440 orang siswa Diklat teknis dan administrasi, 15.000 orang peserta Karya siswa lulus studi S2/S3 sebanyak 325 orang siswa Sertifikat ISO 9001 : 2007 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sebanyak 5 unit 	285 siswa	570 siswa	855 siswa	1.140 siswa	1.440 siswa	143,70	150,90	152,41	156,98	157,17	761,16
			3.000 Org	6.000 Org	9.000 Org	12.000 Org	15.000 Org						
			65 siswa	130 siswa	195 siswa	260 siswa	325 siswa						
			0 Unit	1 unit	3 unit	4 unit	5 unit						
1.2	Perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan												
1.2.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kehutanan sebanyak 1 judul dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal 	1 Renstra 1 Renja	1 Renja	1 Renja	1 Renja	1 Renja	92,82	94,68	96,57	100,92	101,04	486,02

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Milyar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun).											
		• Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 290 satuan kerja (58 satuan kerja per tahun)	58 Satker	58 Satker	58 Satker	58 Satker	58 Satker						
		• Data pengelolaan dan penyelenggaraan kepegawaian untuk 260 orang per tahun.	260 Org	260 Org	260 Org	260 Org	260 Org						
		• Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul (8 judul per tahun)	8 judul	8 judul	8 judul	8 judul	8 judul						
		• Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul	6 judul	12 judul	18 judul	24 judul	30 judul						
1.3	Peningkatan pemanfaatan hutan produksi												
1.3.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen BPK	• Tersusunnya program dan anggaran pada 57 unit kerja per tahun	57 unit kerja	57 unit kerja	57 unit kerja	57 unit kerja	57 unit kerja	99,56	101,55	102,57	105,64	105,77	515,09
		• Data pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terantau secara periodik pada 57 unit kerja per tahun	57 unit kerja	57 unit kerja	57 unit kerja	57 unit kerja	57 unit kerja						
		• Tersusunnya dan terpenuhinya ketentuan-ketentuan hukum bidang Bina Produksi Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket						
		• Tersedianya sarana kerja untuk mendukung tugas-tugas pada 24 unit kerja per tahun	24 unit kerja	24 unit kerja	24 unit kerja	24 unit kerja	24 unit kerja						
1.4	Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan												
1.4.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PHKA	• Kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi meningkat dari 16 UPT menjadi 77 UPT	25 UPT	35 UPT	45 UPT	55 UPT	61 UPT	444,66	453,55	462,24	466,87	467,43	2.294,75
		• Pembentukan 6 UPT baru Ditjen PHKA di Propinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat,	6 UPT	6 UPT	6 UPT	6 UPT	6 UPT						

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Miliar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		<p>Gorontalo dan Maluku Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistemnya dengan sumber dana bersifat hibah, non komersial, dan technical assistance dan program penghapusan hutang melalui DNS meningkat setiap tahunnya, minimal 2 dokumen per tahun • Tersedianya peraturan perundangan bidang konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistemnya yang bersifat komprehensif dalam mendukung dinamika lapangan, 3 dokumen per tahun • Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan pada 6 satker pusat dan 77 satker UPT serta 33 Dinas Provinsi, 580 dokumen • Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan <i>flagship</i>, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU sebanyak 12 unit, DNS, <i>trust fund</i>, dan kolaborasi sebanyak 4 unit 	2 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	8 dokumen	10 dokumen						
			3 dokumen	6 dokumen	9 dokumen	12 dokumen	15 dokumen						
			116 dokumen	232 dokumen	348 dokumen	464 dokumen	580 dokumen						
			2 unit	5 unit	8 unit	10 unit	12 unit						
1.5	Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat												
1.5.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen RLPS	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan bidang RLPS (UU 1 buah, PP/Perpres/Permenhut 12 buah, pedoman/NSPK 70 buah) • Infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan kegiatan RLPS yang efektif dan efisien di 50 satker • Terselenggaranya pembinaan penguatan kelembagaan bidang RLPS, 33 Provinsi 	2 Permenhut	4 Permenhut	7 Permenhut	9 Permenhut	12 Permenhut	159,73	162,92	166,18	174,49	174,70	838,03
			50 satker	50 satker	50 satker	50 satker	50 satker						
			33 Prov.	33 Prov.	33 Prov.	33 Prov.	33 Prov.						

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Milyar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		§ Aparat Ditjen RLPS yang terlatih, pusat dan daerah di bidang RLPS, 50 Satker § Tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker § SIM RLPS, 1 unit § Kerjasama lembaga nasional dan internasional di 4 bidang kegiatan RLPS per tahun	50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker						
			50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker						
			1 Unit 4 Bidang	1 Unit 4 Bidang	1 Unit 4 Bidang	1 Unit 4 Bidang	1 Unit 4 Bidang						
1.6	Penelitian dan pengembangan kehutanan												
1.6.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Litbang Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Rencana program dan anggaran sebanyak 20 satuan kerja per tahun. Laporan dan Evaluasi sebanyak 20 unit kerja per tahun. Sarana dan prasarana perkantoran pada 20 unit kerja per tahun Pembinaan pegawai sebanyak 1.702 orang per tahun Tata laksana keuangan, umum, kerjasama, dan desiminasi pada 20 unit kerja per tahun. 	20 Satker	20 Satker	20 Satker	20 Satker	20 Satker	116,29	118,62	120,99	125,83	125,98	607,70
			20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja						
			20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja						
			1.702 Org	1.702 Org	1.702 Org	1.702 Org	1.702 Org						
			20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja						
1.7	Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenhut												
1.7.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen Kemenhut	<ul style="list-style-type: none"> Renstra Inpektorat Jenderal Kemenhut 1 judul, Renja Inpektorat Jenderal Kemenhut 5 judul, dokumen RKAKL/DIPA 5 judul, dokumen PKPT 5 judul dan data informasi pengawasan 5 judul Laporan lingkup Itjen Kemenhut 120 laporan (Lakip, APIP, Tahunan, Bulanan, Triwulan, semesteran, Kepegawaian dan laporan BMN) Laporan pencermatan kegiatan Kemenhut 200 laporan, laporan pemantauan tindak 	1 Renstra 1 Renja 1 PKPT	2 Renja 2 PKPT	3 Renja 3 PKPT	4 Renja 4 PKPT	5 Renja 5 PKPT	24,11	24,49	25,08	25,84	25,87	125,49
			24 Laporan	48 Laporan	72 Laporan	96 Laporan	120 Laporan						
			105 laporan	210 laporan	315 laporan	420 laporan	525 laporan						

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Miliar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		lanjut hasil audit 300 laporan dan laporan pemutakhiran data 25 laporan • Peraturan bidang pengawasan 30 dokumend an bulletin pengawasan 20 edisi • Pembinaan pegawai sebanyak 1.300 orang dan diklat pengembangan SDM sebanyak 700 orang	6 peraturan 4 bulletin Diklat 140 orang	12 per aturan 8 bulletin Diklat 280 orang	18 per aturan 12 bulletin Diklat 420 orang	24 per aturan 16 bulletin Diklat 560 orang	30 per aturan 20 bulletin Diklat 700 orang						
B	REGULASI												
1	Percepatan harmonisasi dan sikronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah implementasi pembangunan, diantaranya penyelesaian 12.000 peraturan daerah, selambat-lambatnya tahun 2011												
1.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenhut												
1.1.1	Penyelenggaraan dan pembinaan tata hukum dan organisasi Kemenhut	• Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 dokumens. • Laporan evaluasi dan penelaahan hukum bidang pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, konservasi sumberdaya alam, penggunaan kawasan hutan, sebanyak 4 paket per tahun • Bantuan hukum bidang perdata, tata usaha negara dan pidana sebanyak 3 paket per tahun • Pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi pusat, unit pelaksana teknis, dan pembinaan desentralisasi, perbaikan pelayanan publik dan kebijakan publik serta pengawasan melekat, sebanyak 6 paket per tahun	4 jenis 4 paket 3 paket 6 paket	8 jenis 4 paket 3 paket 6 paket	12 jenis 4 paket 3 paket 6 paket	18 jenis 4 paket 3 paket 6 paket	22 jenis 4 paket 3 paket 6 paket	9,80	11,20	11,31	11,65	11,67	55,63

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Miliar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
1.2	Perencanaan makro bidang kehutanan dan pementasan												
1.2.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kehutanan sebanyak 1 judul dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun). Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 290 satuan kerja (58 satuan kerja per tahun) Data pengelolaan dan penyelenggaraan kepegawaian untuk 260 orang per tahun. Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul (8 judul per tahun) Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul 	1 Renstra 1 Renja	1 Renja	1 Renja	1 Renja	1 Renja	92,82	94,68	96,57	100,92	101,04	486,02
			58 Satker	58 Satker	58 Satker	58 Satker	58 Satker						
			260 Org	260 Org	260 Org	260 Org	260 Org						
			8 judul	8 judul	8 judul	8 judul	8 judul						
			6 judul	12 judul	18 judul	24 judul	30 judul						
1.3	Peningkatan pemanfaatan hutan produksi												
1.3.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen BPK	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya program dan anggaran pada 57 unit kerja per tahun Data pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terpantau secara periodik pada 57 unit kerja per tahun Tersusunnya dan terpenuhinya ketentuan-ketentuan hukum bidang Bina Produksi Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun Tersedianya sarana kerja untuk mendukung tugas-tugas pada pada 24 unit kerja per tahun 	57 unit kerja 57 unit kerja	57 unit kerja 57 unit kerja	57 unit kerja 57 unit kerja	57 unit kerja 57 unit kerja	57 unit kerja 57 unit kerja	99,56	101,55	102,57	105,64	105,77	515,09
			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket						
			24 unit kerja	24 unit kerja	24 unit kerja	24 unit kerja	24 unit kerja						
1.4	Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan												

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Miliar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
1.4.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PHKA	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi meningkat dari 16 UPT menjadi 77 UPT Pembentukan 6 UPT baru Ditjen PHKA di Propinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Maluku Utara Kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistemnya dengan sumber dana bersifat hibah, non komersial, dan technical assistance dan program penghapusan hutang melalui DNS meningkat setiap tahunnya, minimal 2 dokumen per tahun Tersedianya peraturan perundangan bidang konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistemnya yang bersifat komprehensif dalam mendukung dinamika lapangan, 3 dokumen per tahun Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan pada 6 satker pusat dan 77 satker UPT serta 33 Dinas Provinsi, 580 dokumen Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan <i>flagship</i>, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU sebanyak 12 unit, DNS, <i>trust fund</i>, dan kolaborasi sebanyak 4 unit 	25 UPT	35 UPT	45 UPT	55 UPT	61 UPT	444,66	453,55	462,24	466,87	467,43	2.294,75
			6 UPT	6 UPT	6 UPT	6 UPT	6 UPT						
			2 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	8 dokumen	10 dokumen						
			3 dokumen	6 dokumen	9 dokumen	12 dokumen	15 dokumen						
			116 dokumen	232 dokumen	348 dokumen	464 dokumen	580 dokumen						
			2 unit	5 unit	8 unit	10 unit	12 unit						
1.5	Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat												
1.5.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen RLPS	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan perundang-undangan bidang RLPS (UU 1 buah, PP/Perpres/Permenhut 12 buah, pedoman/NSPK 70 buah) Infrastruktur yang mendukung 	2 Permenhut	4 Permenhut	7 Permenhut	9 Permenhut	12 Permenhut	159,73	162,92	166,18	174,49	174,70	838,03
			50 satker	50 satker	50 satker	50 satker	50 satker						

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Miliar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		<p>penyelenggaraan kegiatan RLPS yang efektif dan efisien di 50 satker</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pembinaan penguatan kelembagaan bidang RLPS, 33 Provinsi <p>§ Aparat Ditjen RLPS yang terlatih, pusat dan daerah di bidang RLPS, 50 Satker</p> <p>§ Tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker</p> <p>§ SIM RLPS, 1 unit</p> <p>§ Kerjasama lembaga nasional dan internasional di 4 bidang kegiatan RLPS per tahun</p>	33 Prov.	33 Prov.	33 Prov.	33 Prov.	33 Prov.						
			50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker						
			50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker						
			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						
			4 Bidang	4 Bidang	4 Bidang	4 Bidang	4 Bidang						
1.6	Penelitian dan pengembangan kehutanan												
1.6.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Litbang Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana program dan anggaran sebanyak 20 satuan kerja per tahun. • Laporan dan Evaluasi sebanyak 20 unit kerja per tahun. • Sarana dan prasarana perkantoran pada 20 unit kerja per tahun • Pembinaan pegawai sebanyak 1.702 orang per tahun • Tata laksana keuangan, umum, kerjasama, dan desiminasi pada 20 unit kerja per tahun. 	20 Satker	20 Satker	20 Satker	20 Satker	20 Satker	116,29	118,62	120,99	125,83	125,98	607,70
			20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja						
			20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja						
			1.702 Org	1.702 Org	1.702 Org	1.702 Org	1.702 Org						
			20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja						
1.7	Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenhut												
1.7.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen Kemenhut	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra Inpektorat Jenderal Kemenhut 1 judul, Renja Inpektorat Jenderal Kemenhut 5 judul, dokumen RKAKL/DIPA 5 judul, dokumen PKPT 5 judul dan data informasi pengawasan 5 judul • Laporan lingkup Itjen Kemenhut 120 laporan (Lakip, APIP, Tahunan, Bulanan, Triwulan, semesteran, Kepegawaian dan 	1 Renstra 1 Renja 1 PKPT	2 Renja 2 PKPT	3 Renja 3 PKPT	4 Renja 4 PKPT	5 Renja 5 PKPT	24,11	24,49	25,08	25,84	25,87	125,49
			24 Laporan	48 Laporan	72 Laporan	96 Laporan	120 Laporan						

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Milyar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		laporan BMN)	105	210	315	420	525						
		<ul style="list-style-type: none"> Laporan pencermatan kegiatan Kemenhut 200 laporan, laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit 300 laporan dan laporan pemutakhiran data 25 laporan Peraturan bidang pengawasan 30 dokumend an bulletin pengawasan 20 edisi Pembinaan pegawai sebanyak 1.300 orang dan diklat pengembangan SDM sebanyak 700 orang 	105 laporan	210 laporan	315 laporan	420 laporan	525 laporan						
			6 peraturan 4 bulletin Diklat 140 orang	12 per aturan 8 bulletin Diklat 280 orang	18 per aturan 12 bulletin Diklat 420 orang	24 per aturan 16 bulletin Diklat 560 orang	30 per aturan 20 bulletin Diklat 700 orang						

Prioritas 5: Ketahanan Pangan

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Miliar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
A	LAHAN, PENGEMBANGAN KAWASAN, DAN TATA RUANG PERTANIAN												
1	Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian												
1.1	Perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan												
1.1.1	Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%; Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penerbitan penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul 	16% 15% 6 prov 1 judul	32% 30% 12 prov 1 judul	48% 45% 18 prov 1 judul	64% 60% 26 prov 1 judul	80% 80% 32 prov 1 judul	10,21	10,41	10,62	11,10	11,11	53,46

Prioritas 6: Infrastruktur

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Milyar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
A	TANAH DAN TATA RUANG												
1	Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu												
1.1	Perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan												
1.1.1	Penyusunan rencana makro kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia (33 Prop.) Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul. 	1 judul 50% 2 judul	2 judul 70% 4 judul	3 judul 80% 6 judul	4 judul 90% 7 judul	4 judul 100% 8 judul	57,00	58,14	59,30	61,97	62,05	298,46
1.1.2	Penguatan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Keputusan penunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%). Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%. Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%. Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 	3.400 km 20% 15% 15% 15%	8.000 km 40% 30% 30% 30%	12.000 km 60% 45% 45% 45%	18.000 km 80% 60% 60% 60%	25.000 km 100% 75% 75% 75%	70,64	76,01	79,81	83,40	83,50	393,36

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Miliar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		75%											
1.1.3	Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon • Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%; • Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi • Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul 	16% 15% 6 prov 1 judul	32% 30% 12 prov 1 judul	48% 45% 18 prov 1 judul	64% 60% 26 prov 1 judul	80% 80% 32 prov 1 judul	10,21	10,41	10,62	11,10	11,11	53,46
1.2	Peningkatan pemanfaatan hutan produksi												
1.2.1	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi • Tersedianya areal calon/ usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 propinsi 	20% t 20%	40% 40%	60% 60%	80% t 80%	100% 100%	19,42	19,81	20,01	20,61	20,63	100,47
1.3	Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan												
1.3.1	Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial lainnya	<ul style="list-style-type: none"> § Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5% § Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%. § Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng) § Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi § Peningkatan efektifitas pengelolaan 	1% 2% 2 Prov 0 lokasi 10 TN	2% 4% 4 Prov 1 lokasi 20 TN	3% 6% 6 Prov 2 lokasi 30 TN	4% 8% 9 Prov 3 lokasi 40 TN	5% 10% 12 Prov 4 lokasi 51 TN	253,57 13,95	258,64 14,23	263,81 14,51	266,45 14,66	266,77 14,68	1.309,25 72,03

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Milyar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN prioritas											
		§ Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi	0 provinsi	2 Provinsi	4 Provinsi	6 Provinsi	8 Provinsi						
		§ Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung Kerihun, CA Muller)	3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi						

Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Milyar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
A	PERUBAHAN IKLIM												
1	Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut												
1.1	Peningkatan pemanfaatan hutan produksi												
1.1.1	Peningkatan pengelolaan hutan alam produksi	• Peningkatan pengendalian produksi kayu pada areal kerja IUPHHK-HA/HT di hutan gambut, 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	*	*	*	*	*	*
1.2	Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan							*	*	*	*	*	*
1.2.1	Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial	• Peningkatan pengelolaan ekosistem esensial hutan gambut sebagai penyangga kehidupan, 1 paket • Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi	1 paket 0 Prov.	1 paket 2 Prov.	1 paket 4 Prov.	1 paket 6 Prov.	1 paket 8 Prov.	*	*	*	*	*	*
1.2.2	Penyidikan dan perlindungan hutan	• Peningkatan pengamanan hutan konservasi di hutan gambut dari illegal logging, perburuan dan lain-lain, 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	*	*	*	*	*	*
1.2.3	Pengendalian kebakaran hutan	• Penurunan hot spot di hutan gambut, 1 paket • Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran hutan di DAOPS yang terdapat hutan gambut, 1 paket	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	*	*	*	*	*	*
1.2.4	Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	§ Pelaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut)	0 KK	0 KK	1 KK	1 KK	2 KK	*	*	*	*	*	*
1.3	Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat							*	*	*	*	*	*
1.3.1	Penyelenggaraan RHL dan reklamasi hutan di DAS prioritas	• Fasilitas rehabilitasi hutan gambut seluas 120.000 ha	24.000 ha	48.000 ha	72.000 ha	96.000 ha	120.000 ha	75	75	75	75	75	375
1.4	Penelitian dan pengembangan Kemenhut												

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Milyar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
1.4.1	Litbang kebijakan kehutanan dan perubahan iklim	• Penyediaan iptek dasar dan terapan pengelolaan lahan gambut, 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket						
			Bagian dari indikator masing-masing kegiatan					*) bagian dari alokasi anggaran setiap kegiatan					
2	Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun												
2.1	Peningkatan pemanfaatan hutan produksi												
2.1.1	Peningkatan pengelolaan hutan alam produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa lingkungan meningkat sebesar 5% • Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50% • 50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu • Penerbitan IUPHHK-HA/-RE pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 2,5 juta Ha 	1%	2%	3%	4%	5%	48,69	52,66	55,29	58,06	60,96	275,66
			10%	20%	30%	40%	50%						
			10%	20%	30%	40%	50%						
			300.000 Ha	650.000 Ha	1.100.000 Ha	1.750.000 Ha	2.500.000 Ha						
2.1.2	Peningkatan pengelolaan hutan tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3,0 juta ha • Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta ha • Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman 	450.000 ha	1.000.000 ha	1.500.000 ha	2.250.000 ha	3.000.000 ha	44,72	47,51	49,89	52,38	55,00	249,49
			450.000 Ha	1.000.000 Ha	1.500.000 Ha	2.100.000 Ha	2.650.000 Ha						
			5 unit	17 unit	28 unit	37 unit	50 unit						
2.1.3	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi • Tersedianya areal calon/ usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 propinsi 	20% t	40%	60%	80% t	100%	19,42	19,81	20,01	20,61	20,63	100,47
			20%	40%	60%	80%	100%						
2.2	Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat												
2.2.1	Pengembangan perhutanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2,0 juta Ha • Fasilitas 500 kelompok/unit iji usaha pengelolaan HKm 	400.000 Ha	800.000 Ha	1.200.000 Ha	1.600.000 Ha	2.000.000 Ha	1.238,40	1.240,40	1.243,40	1.248,40	1.268,58	6.239
			100 Klpk	200 Klpk	300 Klpk	400 Klpk	500 Klpk						

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Milyar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas 50 unit kemitraan • Fasilitas dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 propinsi • Fasilitas pembangunan hutan rakyat seluas 250.000 Ha • Fasilitas pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten • Fasilitas penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha 	10 Unit 4 Prov.	20 Unit 8 Prov.	30 Unit 16 Prov.	40 Unit 22 Prov.	50 Unit 32 Prov.						
			50.000 Ha	100.000 Ha	150.000 Ha	200.000 Ha	250.000 Ha						
			6 Kab.	12 Kab	18 Kab	24 Kab	30 Kab						
			100.000 ha	200.000 ha	300.000 ha	400.000 ha	500.000 ha						
2.2.2	Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas • Pembangunan base line data pengelolaan DAS di 108 unit BPDAS • Data dan peta lahan kritis di 36 unit BPDAS 	22 DAS 7 unit 7 unit	43 DAS 43 unit 14 unit	68 DAS 68 unit 21 unit	93 DAS 93 unit 28 unit	108 DAS 108 unit 36 unit	137,59	140,34	143,15	150,31	150,49	721,87
2.2.3	Pengembangan perbenihan tanaman hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Areal sumber benih seluas 4.500 ha dikelola secara baik. • Fasilitas pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha. • Pengembangan seed for people, 1 paket per tahun • Pengembangan sentra bibit, 1 paket per tahun 	4.500 ha 1.200 ha 1 paket 1 paket	4.500 ha 2.100 ha 1 paket 1 paket	4.500 ha 3.300 ha 1 paket 1 paket	4.500 ha 4.500 ha 1 paket 1 paket	4.500 ha 6.000 ha 1 paket 1 paket	20,86	21,28	21,70	22,79	22,82	109,44
A.2.2.4	Penyelenggaraan RHL dan reklamasi hutan di DAS prioritas	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha • Fasilitas rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha • Fasilitas pengembangan hutan kota seluas 5.000 Ha • Fasilitas rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha 	160.000 Ha 100.000 Ha 1.000 Ha 60.000 Ha	320.000 Ha 200.000 Ha 2.000 Ha 120.000 Ha	480.000 Ha 300.000 Ha 3.000 Ha 180.000 Ha	640.000 Ha 400.000 Ha 4.000 Ha 240.000 Ha	800.000 Ha 500.000 Ha 5.000 Ha 295.000 Ha	1.520,00 21,49	1.520,00 21,49	1.520,00 21,49	1.775,00 21,49	1.780,00 21,49	8.115,00 107,45
A.2.3	Penelitian dan pengembangan Kemenhut												
A.2.3.1	Litbang konservasi dan rehabilitasi SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul • Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan 	20% 20%	40% 40%	60% 60%	80% 80%	100% 100%	23,00	23,46	23,93	24,89	24,92	120,19

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Milyar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		oleh pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul											
A.2.3.2	Litbang Peningkatan Produktivitas Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul. • Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul 	20%	40%	60%	80%	100%	30,27	30,88	31,49	32,75	32,79	158,18
A.3	Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi pendanaan seperti IHPH, PSDH dan DR												
A.3.1	Peningkatan pemanfaatan hutan produksi												
A.3.1.1	Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP dari pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 10% • Implementasi SIM PUHH secara on line di seluruh unit manajemen IUPHHK dan IPHHK 	2%	4%	6%	8%	10%	62,92	64,18	64,82	66,76	66,84	325,53
A.3.2	Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat												
A.3.2.1	Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas • Pembangunan base line data pengelolaan DAS di 108 BPDAS • Data dan peta lahan kritis di 36 unit BPDAS 	22 DAS	43 DAS	68 DAS	93 DAS	108 DAS	137,59	140,34	143,15	150,31	150,49	721,87
			7 unit	43 unit	68 unit	93 unit	108 unit						
			7 unit	14 unit	21 unit	28 unit	36 unit						
A.3.2.2	Penyelenggaraan RHL dan reklamasi hutan di DAS prioritas	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha • Fasilitas rehabilitasi lahan kritis pada DAS 	160.000 Ha	320.000 Ha	480.000 Ha	640.000 Ha	800.000 Ha	1.520,00 21,49	1.520,00 21,49	1.520,00 21,49	1.775,00 21,49	1.780,00 21,49	8.115,00 107,45
			100.000	200.000	300.000	400.000	500.000						

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Miliar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		prioritas seluas 500.000 ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha						
		• Fasilitas pengembangan hutan kota seluas 5.000 Ha	1.000 Ha	2.000 Ha	3.000 Ha	4.000 Ha	5.000 Ha						
		• Fasilitas rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	60.000 Ha	120.000 Ha	180.000 Ha	240.000 Ha	295.000 Ha						
A.3.2.3	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen RLPS	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan bidang RLPS (UU 1 buah, PP/Perpres/Permenhut 12 buah, pedoman/NSPK 70 buah) • Infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan kegiatan RLPS yang efektif dan efisien di 50 satker • Terselenggaranya pembinaan penguatan kelembagaan bidang RLPS, 33 Provinsi <p>§ Aparat Ditjen RLPS yang terlatih, pusat dan daerah di bidang RLPS, 50 Satker</p> <p>§ Tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker</p> <p>§ SIM RLPS, 1 unit</p> <p>§ Kerjasama lembaga nasional dan internasional di 4 bidang kegiatan RLPS per tahun</p>	2 Permenhut	4 Permenhut	7 Permenhut	9 Permenhut	12 Permenhut	159,73	162,92	166,18	174,49	174,70	838,03
			50 satker	50 satker	50 satker	50 satker	50 satker						
			33 Prov.	33 Prov.	33 Prov.	33 Prov.	33 Prov.						
			50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker						
			50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker						
			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						
			4 Bidang	4 Bidang	4 Bidang	4 Bidang	4 Bidang						
A.3.3	Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan												
A.3.3.1	Penyidikan dan perlindungan hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus baru tindak pidana kehutanan (Illegal Logging, Perambahan, Perdagangan TSL Illegal, Penambangan Illegal dan Kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% • Tunggakan perkara (Illegal Logging, Perambahan, Perdagangan TSL Illegal, Penambangan Illegal dan Kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun • Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikan sebanyak 20% • Peningkatan kapasitas penanganan kasus 	15%	30%	45%	60%	75%	150,41 11,61	153,42 11,84	156,49 12,08	158,05 12,20	158,24 12,21	776,61 59,95
			25%	43,7%	57,8%	68,4%	76,3%						
			4%	8%	12%	16%	20%						
			10 Prov.	10 Prov.	10 Prov.	10 Prov.	10 Prov.						

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Miliar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi											
A.3.3.2	Pengendalian kebakaran hutan	§ Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 § Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 • Peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 provinsi)	20%	36,0%	48,8%	59,2%	67,2%	300,00	275,00	250,00	230,00	220,00	1.275,00
A.3.3.3	Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial	§ Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5% § Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%. § Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng) § Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi § Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN prioritas § Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi § Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung Kerihun, CA Muller)	1%	2%	3%	4%	5%	253,57 13,95	258,64 14,23	263,81 14,51	266,45 14,66	266,77 14,68	1.309,25 72,03
A.3.3.4	Konservasi spesies dan genetik	§ Populasi spesies terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat § Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5% § Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun	0%	1%	1,5%	2%	3%	30,01 60,00	32,56 60,00	33,21 60,00	33,54 60,00	33,58 60,00	162,91 300,00

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Milyar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		§ Terselenggaranya skema DNS Kehutanan, 2 aktifitas § Penguatan kapasitas aparatur dalam upaya mitigasi dan evakuasi satwa akibat bencana kebakaran hutan di 10 provinsi	0 aktifitas 2 Provinsi	2 aktifitas 10 Provinsi	2 aktifitas 10 Provinsi	2 aktifitas 10 Provinsi	2 aktifitas 10 Provinsi						
A.3.4	Dukungan dan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenhut												
A.3.4.1	Penyelenggaraan administrasi keuangan Kemenhut	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 71 unit perusahaan terselesaikan sebesar 80% • Laporan keuangan Kementerian Kehutanan dengan opini wajar tanpa pengecualian mulai laoran tahun 2011, sebanyak 5 judul (1 judul setiap tahun) • Laporan keuangan dan perbendaharaan sebanyak 33 propinsi 	15% 1 judul 33 Prov	30% 1 judul 33 Prov	45% 1 judul 33 Prov	60% 1 judul 33 Prov	80% 1 judul 33 Prov	51,94	54,85	55,40	57,06	57,13	276,38
A.3.4.2	Koordinasi perencanaan dan evaluasi Kemenhut	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 1 judul, serta Rencana Kerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul (1 judul per tahun) • Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebanyak 269 satuan kerja per tahun • Laporan Kinerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Lima Tahun masing-masing 1 judul, dan Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul • Data dan informasi perencanaan Kementerian Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun. 	2 Renstra 2 Renja 269 DIPA 4 laporan 1 paket	2 Renja 269 DIPA 2 laporan 1 paket	2 Renja 269 DIPA 2 laporan 1 paket	2 Renja 269 DIPA 2 laporan 1 paket	2 Renja 269 DIPA 2 laporan 1 paket	24,23 40,00	26,76 50,00	27,03 60,00	28,18 40,00	28,21 30,00	134,41 220,00

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Miliar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
B	PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN												
1	Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun												
1.1	Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan												
1.1.1	Penyidikan dan perlindungan hutan	§ Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL, illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% § Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun § Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20% § Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi	15% 25% 4% 10 Provinsi	30% 43,7% 8% 10 Provinsi	45% 57,8% 12% 10 Provinsi	60% 68,4% 16% 10 Provinsi	75% 76,3% 20% 10 Provinsi	150,41 11,61	153,42 11,84	156,49 12,08	158,05 12,20	158,24 12,21	776,61 59,95
1.1.2	Pengendalian kebakaran hutan	§ Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 § Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 • Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (33 provinsi)	20% 10% 6 DAOPS	36,0% 20% 12 DAOPS	48,8% 30% 18 DAOPS	59,2% 40% 24 DAOPS	67,2% 50% 30 DAOPS	300,00	275,00	250,00	230,00	220,00	1.275,00
1.1.3	Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial	§ Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5% § Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%. § Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)	1% 2% 2 Prov	2% 4% 4 Prov	3% 6% 6 Prov	4% 8% 9 Prov	5% 10% 12 Prov	253,57 13,95	258,64 14,23	263,81 14,51	266,45 14,66	266,77 14,68	1.309,25 72,03

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Miliar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		§ Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi § Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN prioritas § Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi § Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung Kerihun, CA Muller)	0 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	3 lokasi	4 lokasi						
			10 TN	20 TN	30 TN	40 TN	51 TN						
			0 provinsi	2 Provinsi	4 Provinsi	6 Provinsi	8 Provinsi						
			3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi						
1.2	Peningkatan pemanfaatan hutan produksi												
1.2.1	Peningkatan pengelolaan hutan tanaman	§ Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha § Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta ha. § Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman	450.000 ha 450.000 ha 5 unit	1000.000 ha 1000.000 ha 17 unit	1.500.000 ha 1.500.000 ha 28 unit	2.250.000 ha 2.100.000 ha 37 unit	3.000.000 ha 2.650.000 ha 50 unit	44,72	47,51	49,89	52,38	55,00	249,49
2	Pengehentian kerusakan lingkungan termasuk di 11 DAS yang rawan bencana												
2.1	Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat												
2.1.1	Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS	• Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas • Pembangunan base line data pengelolaan DAS di 108 BPDAS • Data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS	22 DAS 7 unit 7 unit	43 DAS 43 unit 14 unit	68 DAS 68 unit 21 unit	93 DAS 93 unit 28 unit	108 DAS 108 unit 36 unit	137,59	140,34	143,15	150,31	150,49	721,87
2.1.2	Penyelenggaraan RHL dan reklamasi hutan di DAS prioritas	• RHL di 13 DAS (Kalsel, Jambi, Sumbar, Jatim, Jabar, DKI, Banten, Riau, Sumsel, DIY, Jateng, Sulteng, Lampung dan Bengkulu)	118.300 ha	218.675 ha	318.950 ha	435.775 ha	552.600 ha	*	*	*	*	*	*
2.1.3	Pengembangan perhutanan sosial	• Fasilitas pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) di 13 DAS (Kalsel, Jambi, Sumbar, Jatim, Jabar, DKI, Banten, Riau, Sumsel, DIY, Jateng, Sulteng, Lampung dan Bengkulu)	400.000 Ha	800.000 Ha	1.200.000 Ha	1.600.000 Ha	2.000.000 Ha	*	*	*	*	*	*

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Miliar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pembangunan hutan rakyat 13 DAS (Kalsel, Jambi, Sumbar, Jatim, Jabar, DKI, Banten, Riau, Sumsel, DIY, Jateng, Sulteng, Lampung dan Bengkulu) • Fasilitas penetapan areal kerja hutan desa 13 DAS (Kalsel, Jambi, Sumbar, Jatim, Jabar, DKI, Banten, Riau, Sumsel, DIY, Jateng, Sulteng, Lampung dan Bengkulu) • Fasilitas hutan rakyat di 13 DAS (Kalsel, Jambi, Sumbar, Jatim, Jabar, DKI, Banten, Riau, Sumsel, DIY, Jateng, Sulteng, Lampung dan Bengkulu) 	52.100 ha	135.500 ha	236.300 ha	359.000 ha	485.500 ha						
			69.200 ha	122.600 ha	160.300 ha	188.000 ha	211.700 ha						
			36.500 ha	73.000 ha	109.500 ha	146.000 ha	182.500 ha						
2.2	Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan												
2.2.1	Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial	§ Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5% § Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%. § Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng) § Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi § Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN prioritas § Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi § Meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung Kerihun, CA Muller)	1%	2%	3%	4%	5%	253,57 13,95	258,64 14,23	263,81 14,51	266,45 14,66	266,77 14,68	1.309,25 72,03
			2%	4%	6%	8%	10%						
			2 Prov	4 Prov	6 Prov	9 Prov	12 Prov						
			0 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	3 lokasi	4 lokasi						
			10 TN	20 TN	30 TN	40 TN	51 TN						
			0 provinsi	2 Provinsi	4 Provinsi	6 Provinsi	8 Provinsi						
			3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi						
2.3	Peningkatan pemanfaatan hutan produksi												
2.3.1	Peningkatan pengelolaan hutan alam produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa lingkungan meningkat sebesar 5% • Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 	1%	2%	3%	4%	5%	48,69	52,66	55,29	58,06	60,96	275,66
			10%	20%	30%	40%	50%						

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Milyar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		50% • 50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu • Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 2,5 juta ha	10%	20%	30%	40%	50%						
			300.000 Ha	650.000 Ha	1.100.000 Ha	1.750.000 Ha	2.500.000 Ha						
2.4	Penelitian dan pengembangan Kemenhut												
2.4.1	Litbang konservasi dan rehabilitasi SDA	• Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul • Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul	20%	40%	60%	80%	100%	23,00	23,46	23,93	24,89	24,92	120,19
			20%	40%	60%	80%	100%						
2.5	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenhut												
2.5.1	Penyelenggaraan Diklat aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya	• Penyelenggaraan SMK Kehutanan 1.440 orang siswa • Diklat teknis dan administrasi, 15.000 orang peserta • Karya siswa lulus studi S2/S3 sebanyak 325 orang siswa • Sertifikat ISO 9001 : 2007 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sebanyak 5 unit	285 siswa 3.000 Org 65 siswa 0 Unit	570 siswa 6.000 Org 130 siswa 1 unit	855 siswa 9.000 Org 195 siswa 3 unit	1.140 siswa 12.000 Org 260 siswa 4 unit	1.440 siswa 15.000 Org 325 siswa 5 unit	143,70	150,90	152,41	155,98	157,17	761,16
2.5.2	Penyuluhan kehutanan	• Pembentukan 500 kelompok Masyarakat Produktif Mandiri • Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh Kehutanan • Kampanye Indonesia Menanam (KIM) di 33 provinsi tiap tahun • Kemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket	100 Klpk 900 Org 33 Prov. 1 Paket	200 Klpk 1.800 Org 33 Prov. 2 Paket	300 Klpk 2.700 Org 33 Prov. 3 Paket	400 Klpk 3.600 Org 33 Prov. 4 Paket	500 Klpk 4.500 Org 33 Prov. 5 Paket	76,74	80,76	81,57	84,01	84,12	407,20
C	PENANGGULANGAN BENCANA												
1	Peningkatan kapasitas aparatur												

No.	SUBSTANSI INTI / PROGRAM (x.x) / KEGIATAN (x.x.x)	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET KUMULATIF					PEMBIAYAAN TAHUNAN (Rp. Milyar)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Total
	pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran hutan												
1.1	Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan												
1.1.1	Pengendalian kebakaran hutan	• Peningkatan kemampuan aparat dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan, 1 paket per tahun	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	*	*	*	*	*	*
1.1.2	Penyidikan dan perlindungan hutan	• Peningkatan penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan, 1 paket per tahun	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	*	*	*	*	*	*
1.2	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenhut												
1.2.1	Penyelenggaraan Diklat aparaturnya Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya	• Diklat aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan, 1 paket per tahun	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	*	*	*	*	*	*
1.2.2	Penyuluhan kehutanan	• Penyuluhan penanggulangan kebakaran hutan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	*	*	*	*	*	*
1.2.3	Penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan kehutanan	• Kampanye penanggulangan kebakaran hutan, 1 paket per tahun	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	*	*	*	*	*	*
			Bagian dari indikator masing-masing kegiatan					*) bagian dari alokasi anggaran setiap kegiatan					